

**NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH:
IDENTIFIKASI PADA SILABUS****UUN LIONAR & AGUS MULYANA**Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Jl. Setia Budi, Bandung, Jawa Barat
Email: lionaruun799@gmail.com

Abstract: Multicultural Values in History Learning: Identification in Syllabus. Presenting multicultural education in the Indonesian education curriculum is an effort to maintain national integration through education. The education curriculum is basically the realization of people's aspirations about the direction of education. The development of education curriculum must be based on the sociocultural context of society, or according to Brady & Kennedy in Curriculum Construction that the curriculum must fulfill all the interests of society regarding cultural, economic and political development. History learning has a big role in the development of multicultural education, considering the historical history presents various historical facts of the nation which certainly has a diversity of identities and cultures. Through the identification of historical material contained in the syllabus of historical subjects in schools, some content was loaded with the development of multicultural values.

Keywords. Multicultural, History Learning, Curriculum.

Abstrak. Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah: Identifikasi pada Silabus. Menghadirkan pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan Indonesia adalah upaya merawat integrasi nasional melalui pendidikan. Kurikulum pendidikan pada dasarnya adalah perwujudan cita-cita masyarakat tentang arah pendidikan. Pengembangan kurikulum pendidikan haruslah berlandaskan konteks sosial kebudayaan masyarakat, atau menurut Brady & Kennedy dalam Curriculum Construction bahwa kurikulum harus memenuhi semua kepentingan masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan budaya, ekonomi maupun politik. Pembelajaran sejarah memiliki andil besar dalam pengembangan pendidikan multikultural, mengingat pembelajaran sejarah menyajikan berbagai fakta sejarah bangsa yang tentunya memiliki keberagaman identitas dan budaya. Melalui identifikasi pada materi sejarah yang terdapat pada silabus mata pelajaran sejarah di sekolah ditemukan beberapa konten yang sarat dengan pengembangan nilai multikultural.

Kata Kunci. Multikultural, Pembelajaran Sejarah, Kurikulum.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum kurikulum dapat dilihat dari empat dimensi: 1) kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi; 2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; 3) kurikulum sebagai suatu kegiatan (proses); dan 4) kurikulum sebagai suatu

hasil belajar (Hasan, 1987: 28). Jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Artinya, apa yang terjadi dalam kurikulum sebagai proses adalah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pengembang kurikulum. Kualitas yang dimiliki seorang peserta didik dari hasil proses tersebut adalah kualitas yang direncanakan kurikulum.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia kebudayaan menjadi salah satu landasan kuat, mengingat kurikulum harus dapat mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik yang berasal dari berbagai kebudayaan yang ada, oleh sebab itu menempatkan unsur kebudayaan sebagai indikator utama dalam pengembangan kurikulum adalah keniscayaannya.

Pasca reformasi pendidikan multikultural (multi budaya) semakin mendapat tempat untuk dikembangkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pengembangan tersebut menjadi sarana alternatif dalam pemecahan konflik yang selama masa orde baru marak terjadi, pendekatan pendidikan multikultural juga dapat membendung arus globalisasi yang membuat peserta didik tercerabut dari akar budayanya (Zuhdi, 2014: 308; Mahfud, 2016: 125).

Salah satu bentuk kurikulum tertulis adalah silabus yang di dalamnya memuat garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran (Salim, 1987: 98). Guru sebagai pengembang kurikulum harus memiliki keterampilan dalam memahami apa sebenarnya tujuan-tujuan yang diharapkan dari sebuah naskah kurikulum yang berbentuk teks tersebut. Oleh sebab

itu, penting kiranya untuk menganalisis muatan dari sebuah silabus untuk kemudian diidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Pendidikan sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Pendidikan sejarah memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, yang dalam hal ini juga termasuk nilai penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penting kiranya diidentifikasi dan dianalisis nilai-nilai multikultural yang terdapat pada perangkat kurikulum tersebut, hal ini akan menjadi arah dan pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan saja yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan atau kesetaraan budaya (Mahfud, 2016: 75), atau menurut Kymlicka (2015: 2) adalah gerakan politik tentang hak-hak minoritas yang selama ini diberlakukan tidak adil oleh sistem liberalisme. Kymlicka menerangkan bahwa sistem liberal yang mengedepankan hak asasi manusia belum

cukup dalam menyelesaikan masalah mengenai keberadaan kelompok minoritas, karena selama ini minoritas dipaksakan untuk berasimilasi, menerima bahasa, agama, dan adat dari kelompok mayoritas, bahkan cara radikal juga telah dilakukan dengan pembersihan etnis (genosida) seperti yang terjadi di Amerika dan Jerman. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan kesederajatan dalam perbedaan budaya.

Secara historis, multikulturalisme berawal dari teori *melting pot* yang diperkenalkan J. Hector. Teori tersebut menekankan penyatuan beragam budaya dan melecehkan budaya asal terutama di Amerika, pendapat Hector bahwa seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant (WASP)* sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. Ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori *melting pot* mendapat kritik dan kemudian lahirlah teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protestant (WASP)* diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional (Rosyada, 2014: 2). Pada akhirnya, interaksi kultural antar

berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang luasa, sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara luasa.

Melalui berbagai teori di atas bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun, pada dekade 1960an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika Hitam, atau imigran Amerika Latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya (Abdullah, 2006: 14). Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya merupakan sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran

bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu.

Rob Reich (2002) dalam bukunya *Bridging Liberalism and Multiculturalism in America Education (The University of Chicago Press)* membagi dua macam multikulturalisme, yaitu: *Multikulturalisme deskriptif*, adalah kenyataan sosial yang dikenal oleh para pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme jenis ini tidak mengakui adanya suatu konsep mengenai apa yang disebut sesuatu yang baik (good). Sesuatu yang baik tergantung pada nilai pluralistik di dalam masyarakat. Sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat itulah yang benar. Dengan demikian kebenaran yang absolut dan tunggal tidak dikenal di dalam konsep multikulturalisme jenis ini, yang baik adalah yang dianggap benar oleh suatu masyarakat, yang baik tidak mendahului dari apa yang benar. *Multikulturalisme normatif*, berkaitan dengan dasar-dasar moral. Dasar moral antara lain keterkaitan seseorang dalam suatu negara-bangsa. Artinya terdapat suatu ikatan moral dari anggota-anggotanya di dalam batas-batas negara-bangsa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama. Multikulturalisme jenis ini adalah hal yang bersifat kritis sosial atau rekonstruksi sosial dalam membangun suatu wadah di dalam pluralitas budaya yang ada di dalam komunitas tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Benedict Anderson tentang "*the imagined community*" atau komunitas yang dibayangkan oleh suatu kelompok sebagai suatu cita-cita yang diinginkan oleh semua anggotanya (Supriyoko, 2005).

Secara teoritis pengertian multikulturalisme sebagai pandangan

dunia yang kemudian diwujudkan dalam *politic of recognition* di paparkan oleh Bikhu Parekh (Mahfud, 2016: 93-95) dalam bukunya *National Culture and Multiculturalisme* (1997), yang secara jelas membedakan lima macam multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme isolasionis dimana berbagai kelompok menjalankan hidup secara otonom yang hanya terlibat interaksi satu sama lain. *Kedua*, multikulturalisme akomodatif dimana kelompok dominan membuat penyesuaian dengan kaum minoritas. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, multikulturalisme kritikal dan interaktif dimana setiap kelompok menuntut kultur kolektif. *Kelima*, multikulturalisme kosmopolitan dimana paham yang berusaha menghapus batas-batas kultural sehingga setiap individu tidak terikat pada budaya tertentu.

Dalam konteks Indonesia, menurut Soyomukti (2015: 101) bahwa paham multikulturalisme di Indonesia menjadi semarak kembali setelah masyarakat belajar dari pengalaman pahit dari diterapkannya politik monokulturalisme selama 32 tahun oleh kekuasaan Orde Baru. Salah satu contoh konkret dari praktek monokulturalisme adalah diskriminasi terhadap orang Tionghoa yang berkaitan dengan penyelenggaraan perayaan agama. Pada Januari 2000, presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi presiden nomor 41 tahun 1967 yang kemudian mengakhiri diskriminasi tersebut (Bertrand, 2012: 166).

Pengertian Pendidikan Multikultural

Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun, hal demikian bukan berarti pendidikan multikultural tidak memiliki pengertian secara konseptual. Pendidikan multikultural berkomitmen pada tujuan memberikan seluruh peserta didik –tanpa memandang status sosial ekonomi; jender; orientasi seksual; atau latar belakang etnis, rasa tau budaya-kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah (Parkay & Standford, 2011: 35). Pendidikan multikultural lebih mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berpandangan toleran (inklusif) terhadap realitas sosial masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan (Mahfud, 2016: 185-187).

Dalam buku *An Introduction to Multicultural Education*, James A. Banks (2006) menegaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan cara memandang realitas dan cara berpikir, bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya (Parkay & Standford, 2011: 35). Ia juga menegaskan pendidikan multikultural berarti ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik baik pria maupun wanita, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-

macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah (Ibrahim, 2008: 121).

Menurut HAR Tilaar (Mahfud, 2016: 178-179) bahwa pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia (PD) kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini, selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Paul C. Gorski (2010) dalam *The Challenge of Defining 'Multicultural Education'* menjelaskan tujuan reformasi pendidikan lewat gerakan pendidikan multikultural adalah untuk mengubah sistem pendidikan yang lebih berbasiskan keadilan sosial, kesetaraan-keadilan pendidikan, pedagogi kritis, dan dedikasi, dalam rangka memberikan pengalaman pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik mengembangkan sepenuhnya seluruh potensi dirinya, dan menjadi anggota masyarakat yang sadar sosial dan berperan aktif secara lokal, nasional, dan juga global (Amirin, 2012: 4). Gorski merumuskan tiga tujuan utama pendidikan multikultural, yaitu: 1) meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya; 2) menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya; 3) menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, dapat

dikatakan pendidikan multikultural adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya tanpa membedakan ras, etnik, agama dan strata sosial.

Pada bulan Oktober 1994 UNESCO merekomendasi ide pendidikan multikulturalisme menjadi komitmen global. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan (Rahim 2012: 164).

Rumusan pendidikan multikultural menurut James A. Banks (Parkay & Standford, 2011: 35) memiliki berbagai dimensi pokok. *Pertama*, *content integration* yaitu upaya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. *Kedua*, *the knowledge construction proses*, yaitu suatu cara (metode) bagaimana membawa peserta didik memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). *Ketiga*, *an equity pedagogy*, yaitu usaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam

rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pengajaran mereka, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan peserta didik yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Kelima, budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan.

Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia

Pendidikan diberi tanggung jawab untuk menciptakan rasa kemanusiaan, moral, dan kepribadian yang mendukung terjadinya kedamaian di masyarakat melalui penyebaran pengetahuan, wawasan, dan spirit bagi generasi (anak-anak, remaja, pemuda secara khusus, dan rakyat secara umum). Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis (Nurhadi, 2004: 2-3), sehingga dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang bebas dari unsur nilai (Lickona, 2016: 33). Oleh sebab itu, kebudayaan dan peradaban yang maju pastilah didukung dengan pendidikan yang berhasil (Soyomukti, 2015: 99).

Memperhitungkan faktor kebudayaan sebagai landasan penting dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, evaluasi suatu kurikulum pendidikan merupakan salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum (Mahfud, 2016: 230). Jika demikian, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural

dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi.

Keragaman bangsa bukan saja dalam hal penduduknya dengan berbagai latar belakang keagamaan, suku, orientasi budaya, tetapi juga dalam arti geografis karena Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia (Sindhunata, 2000: 105). Dalam konteks Indonesia yang multikultural dewasa ini, menurut Sultan Hamengkubuwono (2008: 14) idiom yang harus dan tetap dijadikan basis integrasi nasional adalah *Bhinneka Tunggal Ika*. Ia mengatakan pengalaman telah mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan (*tunggal-ika*) yang potensial bisa melahirkan kesatuan dan persatuan, melainkan pengakuan akan pluralitas (*kebhinekaan*), selain itu kesediaan untuk menghormati kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran pendidikan yang berlandaskan semangat multikultural adalah suatu keniscayaan bagi tercapainya kerukunan dalam praktek berbangsa, terkhusus Indonesia.

Pendidikan sejarah memiliki peran dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik. Dalam buku *Prasangka dan Konflik*, Liliwari mengemukakan bahwa sumber konflik yang mendorong situasi disintegrasi ada yang berasal dari faktor historis. Oleh sebab itu, dalam mengajar sejarah, guru harus mampu menyajikan interpretasi sejarah yang memiliki kebermaknaan bagi peserta didik (Zuhdi, 2014: 311). Hal demikian dimaksud karena pemahaman terhadap makna dalam setiap fakta sejarah adalah sesuatu yang prinsipil. Pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa (Mulyana,

2009: 79), proses internalisasi nilai-nilai peristiwa masa lalu berupa asal usul, silsilah, pengalaman kolektif dan keteladanan pelaku sejarah dengan *output* yang meliputi pemahaman peristiwa sejarah bangsa, meneladani kearifan, dan sikap bijak pelaku sejarah (Garvey, 2015: xi).

Dari penjelasan di atas maka pendekatan multikultural dalam kurikulum sejarah harus dapat mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik, memanfaatkan kebudayaan mereka sebagai sumber konten dan sebagai titik berangkat untuk pengembangan kebudayaan, pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat kebangsaan berdasarkan *Bhinneka Tunggal Ika*, mengembangkan perilaku yang etis, dan dapat memanfaatkan kebudayaan pribadi peserta didik sebagai bagian dari *entry behavior* peserta didik sehingga dapat menciptakan "kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berprestasi" (Hasan, 2012: 109).

Hasan (2012: 110) menegaskan bahwa kurikulum pendidikan sejarah tidak boleh menggunakan wawasan bahwa suatu kesatuan bangsa haruslah didasarkan pada satu kesamaan yang ada, dan kurikulum mencoba mengubah perbedaan menjadi kesamaan. Dengan demikian, alternatif untuk menempatkan pembelajaran sejarah berbasis multikultural yakni melalui sejarah lokal. Melalui sejarah lokal pendidikan sejarah akan menyajikan keberagaman budaya yang mesti diketahui peserta didik dan kemudian dipertahankan sebagai suatu kekayaan bangsa. Pendidikan sejarah tidak lagi terpusat pada sejarah nasional, melainkan harus dikembangkan dengan mempelajari sejarah lokal, dengan

demikian peserta didik mempelajari identitasnya dan mengetahui jatid dirinya sebagai warga bangsa (Zuhdi, 2017: 39). Pengungkapan berbagai sisi kehidupan atau sejarah dalam lokalitas, akan semakin menggugah kesadaran betapa masing-masing budaya memiliki keanekaragaman nilai-nilai yang luhur (Supardi, 2014: 96).

Zuhdi (2017: 138) memberi contoh konten sejarah yang memiliki kaitan dengan semangat multikulturalisme, salah satunya adalah sejarah maritim Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki rasa toleransi yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan hubungan baik dalam perdagangan antar pulau di Nusantara. Oleh sebab itu, pengertian yang benar untuk negara kepulauan Indonesia "bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut", melainkan "laut yang ditaburi pulau-pulau". Untuk mewujudkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah, Hasan (2012) menegaskan beberapa hal pokok yang harus diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sejarah, antara lain:

1. Tujuan pendidikan sejarah untuk masa kini dan masa akan datang harus memperhitungkan adanya keragaman budaya bangsa. Tujuan pendidikan sejarah tidak boleh lagi hanya mengembangkan pemahaman sejarah yang berdasarkan satu penafsiran yang didominasi oleh satu budaya dan mengorbankan budaya lain.
2. Kurikulum pendidikan sejarah masa depan harus mengakomodasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di suatu lokal yang paling kecil sekali pun.
3. Ketersediaan sumber atau cerita sejarah.

4. Komponen asesmen mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan hal di atas, maka salah satu alternatif pelaksanaan pendidikan sejarah adalah melalui pendekatan kontekstual yang mengaitkan antara teks dengan konteks (Komalasari, 2014: 7, Johnson, 2007: 65). Melalui pendekatan kontekstual proses pembelajaran akan lebih bermakna karena peserta didik langsung dihadapkan dengan hal-hal yang berada disekelilingnya. Pendekatan ini sangat mendukung pembelajaran sejarah berbasis multikultural karena apa yang kemudian diketahui oleh peserta didik kemudian dapat dibandingkan dengan hal-hal lain yang berbeda dan terdapat di luar lingkungan dan budaya peserta didik. Atas konstruksi pemahaman tersebut, maka terjadilah proses pembangunan *skema*, yang menurut Jean Piaget melalui proses *asimilasi* dan *akomodasi*. *Skema* adalah struktur kognitif yang terbentuk melalui proses pengalaman. *Asimilasi* adalah proses penyempurnaan skema yang telah terbentuk, dan *akomodasi* adalah proses perubahan skema (Woolfolk, 2009: 51).

Identifikasi Nilai Multikultural dalam Silabus Sejarah

Adapun indikator yang dijadikan pedoman dalam analisis silabus mata pelajaran sejarah yang berkaitan dengan nilai multikulturalisme adalah pendapat dari Maksum & Luluk (2004) (dalam Mahfud, 2016, hlm. 191) diantaranya: 1) tujuannya membentuk "manusia budaya" dan menciptakan "masyarakat berbudaya"; 2) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis; 3) metodenya demokratis, yang menghargai

aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis; 4) evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

Silabus yang dianalisis adalah silabus Mata Pelajaran Sejarah Indonesia (wajib) berdasarkan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X dan XI yang diterbitkan pada tahun 2016. Silabus ini memuat 4 aspek Kompetensi Inti (KI) di antaranya: 1) kompetensi spiritual, 2) kompetensi sosial, 3) kompetensi pengetahuan, dan 4) kompetensi keterampilan. Kompetensi spritual mengarah kepada nilai-nilai religi yang harus dimiliki peserta didik sesuai dengan keyakinannya. Kompetensi sosial mengarah kepada penguasaan nilai-nilai moral yang harus dimiliki, dipahami, dan dikembangkan oleh peserta didik seperti jujur, toleran, peduli, dan lain sebagainya. Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi berupa pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, dan kompetensi keterampilan berkaitan dengan pengembangan kreatifitas peserta didik dalam menerapkan keilmuan dalam bentuk praktek keilmuan.

a. Silabus mata Pelajaran Sejarah Indonesia SMA kelas X

Silabus ini memuat materi pokok mengenai: 1) cara berfikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah, 2) Indonesia zaman praaksara: awal kehidupan manusia Indonesia, 3) Indonesia zaman hindu-buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, dan 4) zaman perkembangan kerajaan-kerajaan islam di Indonesia.

Dari proses identifikasi ditemukan beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme, diantaranya:

1) *Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.*

KD ini adalah bagian dari KI spritual. KD ini menunjukkan kompetensi yang mengarah pada pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan nasional, berupa pemahaman pada keanekaragaman agama di bangsa Indonesia. Berdasarkan indikator multukultural yaitu terkait bahwa mengamalkan ajaran agama yang dianut merupakan perwujudan aktifitas budaya manusia yang mempunyai kekuatan nilai dan diekspresikan melalui penghormatan atas hak asasi manusia berupa hak menjalankan agama yang dianutnya. Sulalah (2011, hlm. 89) dalam *multicultural education* menjelaskan bahwa: *pertama*, perbedaan budaya mempunyai kekuatan dan nilai, *kedua* sekolah harus di bentuk untuk mengekspresikan makna hak asasi manusia dan memghormati hak asasi manusia.

2) *Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.*

KD ini adalah bagian dari KI sikap sosial. Menurut Sulalah (2011, hlm. 89) konsep pendidikan multikultural berprinsip

pada: (a) keadilan sosial dan persamaan hak bagi seluruh masyarakat harus menjadi puncak kepentingan dalam mendesain dan melaksanakan kurikulum, (b) sikap dan nilai-nilai yang dapat membentuk masyarakat demokratis adalah perlu untuk dipromosikan di sekolah, dan (c) kerjasama dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Berkait dengan nilai-nilai yang terkandung pada tuntutan KI sikap sosial di atas, hal ini bersesuaian dengan konsep pengembangan karakter yang dipekenalkan oleh Likona (dalam Sulalah, 2011, hlm.89) berupa *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*.

3) *Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.*

Merupakan bagian dari KI pengetahuan. Adapun KD yang berkaitan dengan pendidikan multikultural diantaranya: (a) menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu), (b) menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia, (c)

menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, (d) menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, dan (e) menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini.

4) *Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.*

Merupakan bagian dari KI ketrampilan. Adapun KD yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, antara lain: (a) menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu) dalam bentuk tulisan, (b) menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan, (c) mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan, (d) menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan

unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini, (e) mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah, serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan, dan (f) menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini.

Berdasarkan tuntutan kompetensi inti, kompetensi dasar dan materi pokok mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X kurikulum 2013 di atas yang berkait dengan aspek pengetahuan dan keterampilan dipandang sebagai pendidikan multikultural sebagaimana indikator yang diungkapkan oleh Maksim & Luluk (2004) (dalam Mahfud, 2016, hlm. 191) di atas. Sementara itu, Hasan (2012, hlm. 115) menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran multikultural dalam pembelajaran sejarah haruslah berpedoman pada prinsip kurikulum, diantaranya:

keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat

- a) Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi
- b) Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa

- c) Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

b. Silabus mata pelajaran sejarah Indonesia SMA kelas XI

Silabus ini memuat materi pokok mengenai: (1) perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat, (2) pergerakan nasional Indonesia, (3) proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan (4) perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda.

Dari proses identifikasi ditemukan beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme, diantaranya:

- 1) *Menghayati nilai-nilai persatuan dan keinginan bersatu dalam perjuangan pergerakan nasional menuju kemerdekaan bangsa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa dan negara Indonesia.*

KD ini merupakan bagian dari KI spiritual. Secara implisit KD ini menghendaki peserta didik untuk menghayati nilai-nilai berupa nilai persatuan yang tumbuh dalam periode pergerakan nasional. Persatuan yang dimaksud adalah bersatunya banyak suku, etnis, dan agama menjadi identitas nasional Indonesia, hal ini juga berarti bahwa peserta didik harus menyadari perbedaan suku bangsa merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dengan perbedaan tersebut kemudian dapat bersatu menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Hal ini juga bersesuaian dengan ciri pendidikan multikultural yang diperkenalkan oleh Maksim & Luluk

(2004) berupa "materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis".

2) *Meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai para pejuang dalam mewujudkan cita-cita mendirikan negara dan bangsa Indonesia dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari.*

KD ini merupakan bagian dari KI sosial. Peserta didik juga dituntut untuk memahami, mencontohkan, dan mempraktekkan perilaku yang bermoral dari para pejuang bangsa, seperti nilai kerjasama dapat dikembangkan peserta didik melalui keterbukaan dan penerimaan pada teman-teman yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang cinta damai dan menjunjung tinggi inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian peserta didik pun menjadi pribadi yang sadar akan keberagaman dalam berbangsa. Hal ini juga sesuai dengan ciri dari pendidikan multikultural yang tujuannya membentuk "manusia budaya" dan menciptakan "masyarakat berbudaya", dan metode demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis.

3) *Menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan sesudahnya sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan.*

Karena terdapatnya keberagaman suku bangsa yang berasal dari berbagai pulau maka berdampak pada munculnya organisasi-organisasi kedaerahan yang

berjuang dalam pergerakan nasional seperti Jong Islamited Bond, Jong Cilebes, Jong Java, Jong Sumatra Bond, dan lain sebagainya. Corak perjuangan dari masing-masing organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari tokoh yang terhimpun di organisasi tersebut, oleh sebab itu faktor-faktor perbedaan budaya, agama juga ikut mempengaruhi corak dalam gerakan organisasi ketika itu. Sumpah Pemuda adalah bentuk dari bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada terakomodasi oleh para pemuda di tahun 1928, pada periode ini nilai yang dapat diambil oleh peserta didik adalah semangat inklusivitas, karena menurut Mahfud (2016, hlm. 185-187) pendidikan multikultural juga mengarahkan berpandangan toleran (inklusif) terhadap realitas sosial masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Selain itu, KD ini juga menuntut peserta didik untuk mengembangkan apa yang dipahaminya dalam bentuk keterampilan menyajikan narasi sejarah, hal ini merupakan proses dari *moral feeling* dan *moral action* (Lickona, 2015, hlm. 34). Mengidentifikasi perbedaan merupakan bagian dari pendidikan multikultural seperti yang dikatakan James A. Banks (Parkay & Standford, 2011: 35) berupa *the knowledge construction proses* yaitu suatu cara bagaimana membawa peserta didik memahami implikasi budaya ke dalam mata pelajaran.

4) *Menganalisis peran tokoh-tokoh Nasional dan Daerah dalam perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia.*

KD ini mengarahkan peserta didik disamping memahami perjuangan tokoh nasional juga memahami tokoh

lokal/daerah yang telah berjuang dalam menentang kolonial. Adanya keberimbangan antara memahami tokoh nasional dan lokal merupakan usaha untuk memahami bahwa perjuangan melawan penjajah dilakukan oleh banyak suku bangsa, hampir dapat dikatakan di setiap daerah memiliki tokoh lokalnya masing-masing, peserta didik dituntut untuk mengetahui bagaimana tokoh lokal berjuang dan jika perlu membandingkannya dengan perjuangan tokoh lokal dari daerah lain untuk kemudian menemukan kesamaan dan perbedaan, akumulasi dari perjuangan tingkat lokal tersebut kemudian menjadi bentuk perjuangan besar dalam menuju identitas nasional Indonesia. Pada KD ini secara implisit juga terdapat unsur pendidikan multikultural, walau tidak secara tegas akan tetapi materi memuat tentang beberapa tokoh nasional yang berjuang melawan penjajah Belanda, seperti Sultan Hasanuddin di Makassar, Tuanku Imam Bonjol di Sumatra Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa, dan lain sebagainya. Melalui materi ini peserta didik dapat melacak bagaimana faktor geografis, agama, dan budaya mempengaruhi munculnya perlawanan, dengan mempelajari beberapa latar belakang tokoh tersebut peserta didik telah diajak untuk memahami nilai-nilai multikultural.

5) Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia.

Bersatunya beragam suku bangsa dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menjadi satu identitas yang dinamakan Indonesia adalah perwujudan

dari semangat multikultural, oleh sebab itu, dalam KD ini peserta didik dituntut untuk memahami berbagai perbedaan dan kesamaan dari setiap organisasi pergerakan sehingga pada akhirnya secara bersama-sama mencapai kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, yang jika ditinjau dalam konteks historis merupakan proses dialektika dari pencarian identitas nasional. Pada KD ini peserta didik diajak untuk memaknai proklamasi sebagai kesepakatan dan hasil kompromi antar suku, etnis, dan agama yang ada. Sebagai contoh konkret adalah ketika perubahan kalimat dalam Piagam Jakarta "Kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan tersebut adalah simbol pengakuan akan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa, maka dalam KD ini guru pun dituntut untuk mempertegas semangat tersebut.

KESIMPULAN

Multikulturalisme pada dasarnya adalah gerakan kesetaraan dan kesederajatan dalam keberagaman. Titik penting dari multikulturalisme adalah adanya upaya saling keterbukaan dan saling menerima perbedaan. Dari sejarah yang panjang konsep multikulturalisme diperkenalkan dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa barat, namun secara praktek pada dasarnya bangsa Indonesia telah menjalankan praktek multikultural tersebut jauh sebelum bangsa barat melakukannya. Praktek-praktek tersebut dapat dilihat dari laporan Furnivall yang mengamati keberagaman suku, etnis, dan agama yang hidup dengan damai dalam masyarakat tradisional. Menyadari adanya kekayaan atas perbedaan, di awal abad ke-20 para pemuda mencoba menyatukan perbedaan tersebut menjadi sebuah

ikatan bangsa melalui Sumpah Pemuda. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak disatukan menjadi satu bentuk baru melainkan diikat dalam satu identitas bangsa Indonesia yang memberi kebebasan bagi banyak suku bangsa untuk tetap mengembangkan budaya mereka.

Pendidikan multikultural di Indonesia diimplementasikan untuk menemukan bentuk ideal dari praktek pendidikan yang mengedepankan keberagaman suku bangsa. Melalui pendidikan sejarah, praktek pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dengan menyajikan konten/materi peristiwa masa lalu yang sarat dengan keberagaman. Pembelajaran sejarah lokal merupakan salah satu pembelajaran yang dapat mendukung proses pendidikan multikultural, karena materi yang beragam akan membuat peserta didik semakin memahami keberagaman tersebut sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, usaha-usaha untuk mengembangkan pembelajaran sejarah lokal pada akhirnya mengerucut pada usaha yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas, oleh sebab itu guru sejarah harus memiliki: 1) pemahaman konseptual yang memadai berupa pengetahuan dalam konteks isu-isu global; 2) guru harus memiliki pengalaman lintas budaya berupa pemahaman dan interaksi atas perbedaan latar belakang masing-masing orang; dan 3) guru harus menguasai keterampilan pedagogis yang berkaitan dengan metode, pendekatan, strategi, dan model.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. (2006). Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan. *Jurnal Antropologi*

Sosial Budaya Etnovisi, 2 (1), 12-21.

- Amirin, Tatang. M. (2012). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1 (1), hlm 1-16.
- Bertrend, Jacques. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Terjemahan. Yogyakarta: Ombak
- Buwono, Sultan Hamengku. (2008). *Merajut Kembali Ke-Indonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Garvey, Brian & Mary Krug. (2015). *Model-model Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah*. Terjemahan. Yogyakarta: Ombak
- Hasan, S. Hamid. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia (Isu dalam Ide dan Pembelajaran)*. Bandung: Rizqi Press.
- Ibrahim, Ruslan. (2008). Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik. *Jurnal El-Tarbawi*. 1 (1), hlm 112-127
- Johnson, Elaine B. (2007). *Contextual Teaching and Learning*. Terjemahan. Bandung: MLC
- Komalasari, Kokom. (2011). *Pembelajaran Kontekstual (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Kymlicka, W. (2015). *Kewargaan Multikultural*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES
- Lickona, Thomas. (2016). *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahfud, Choirul. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyana, Agus & Darmiasti. (2009). *Historiografi di Indonesia: dari*

- Magis-Religius hingga Strukturis*. Bandung: Refika Aditama
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Nurhadi. (2004). *Kurikulum 2004 (Pertanyaan dan Jawaban)*. Jakarta: PT. Gramedia
- Parkay, Forrest. W & Standford. (2011). *Menjadi Seorang Guru*. Terjemahan. Jakarta: Indeks.
- Rahim, Rahmawaty. (2012). Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas. *Jurnal Analisis*. 7 (1), hlm 161-182
- Roosseno, Toeti Heraty N. (2015). *Tentang Manusia Indonesia dsb*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosyada, Dede. (2014). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konseptual. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1 (1), 1-12
- Sidhunata (Ed.). (2000). *Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Soyomukti, Nurani. (2015). *Teori-teori Pendidikan: dari Tradisional, (neo) Liberal, Marxis-Sosialis, hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Supardi. (2014). Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2 (1), hlm 91-99
- Supriyoko. (2005). *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Woolfolk, Anita. (2009). *Educational Psychology Active Learning Edition*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zuhdi, Susanto. (2014). *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu
- Zuhdi, Susanto. (2017). *Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra